



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE 2023

PEMERINTAH KAB.
BOLAANG MONGONDOW
UTARA



PEMERINTAH
DIGITAL
Birokrasi Berda
DIGITAL GOVERNMENT
SPBE SUMMIT
KEMPINSKI GRAND BALLROOM - JAKARTA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2023 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perbaikan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan yang selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Berkat adanya kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Jakarta, 26 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

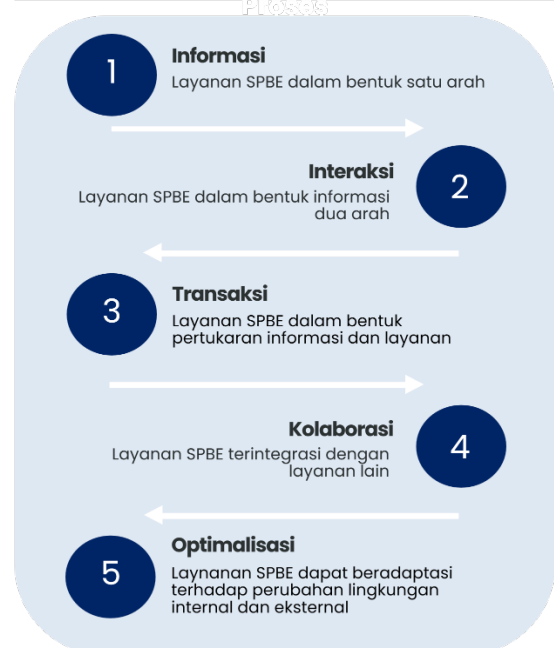
Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, serta penilaian visitasi (pada instansi tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi

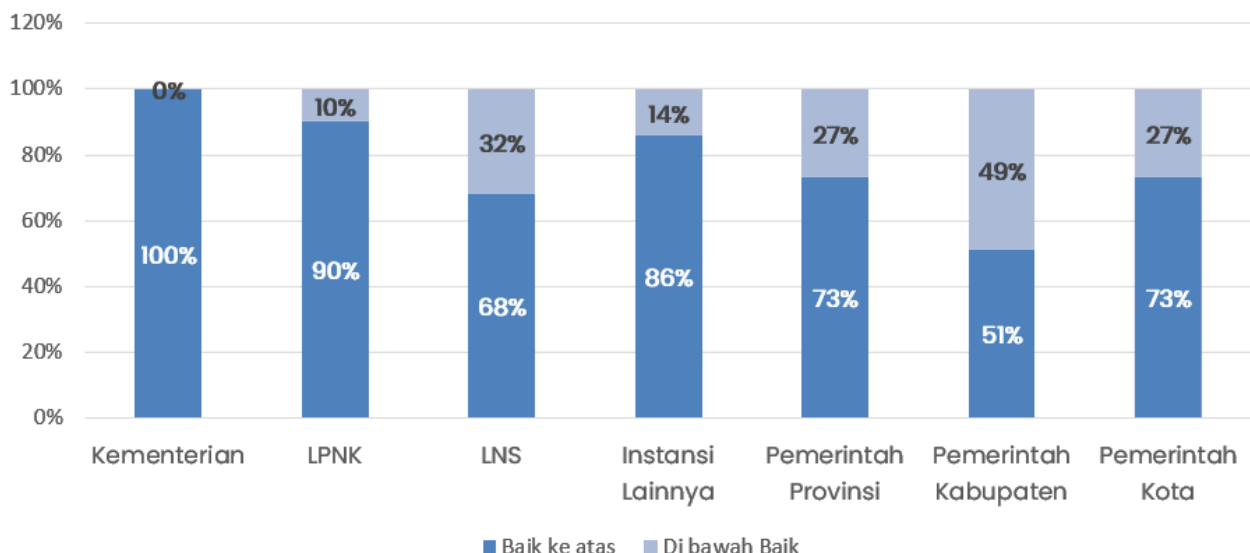


EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

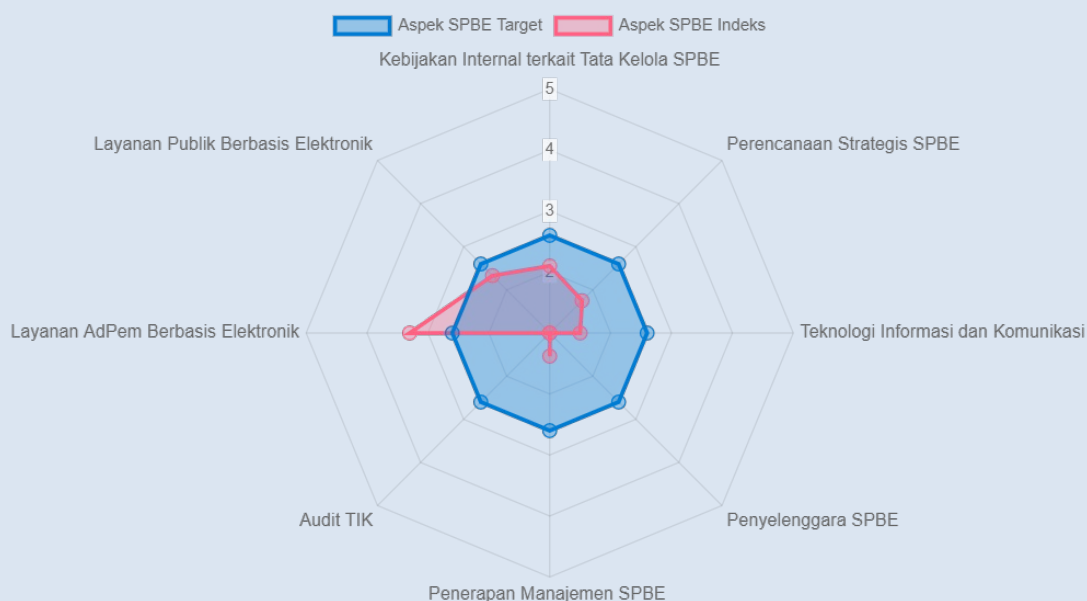
Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)</p>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6		Cukup																			
5	< 1,8		Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,79	3,66	3,40	2,95	3,01	2,59	2,50
Domain Kebijakan	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Domain Tata Kelola	2,27	3,42	3,02	2,66	2,56	2,01	2,54
Perencanaan Strategis	2,10	3,18	2,92	2,63	2,31	1,86	2,26
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,37	3,57	3,20	2,68	2,72	2,09	2,70
Penyelenggaraan SPBE	2,43	3,62	2,88	2,68	2,72	2,18	2,79
Domain Manajemen	1,65	2,53	2,31	1,98	1,81	1,45	1,82
Penerapan Manajemen SPBE	1,68	2,53	2,32	2,03	1,79	1,49	1,85
Audit TIK	1,57	1,55	2,29	1,85	1,86	1,35	1,73
Domain Layanan SPBE	3,45	4,21	3,99	3,43	3,64	3,28	3,67
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	4,16	3,95	3,56	3,64	3,30	3,61
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,45	4,30	4,06	3,24	3,65	3,27	3,77

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2023



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2023
SPBE	2,19
Domain Kebijakan SPBE	2,10
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	2,10
Domain Tata Kelola SPBE	1,50
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	1,75
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	1,50
<i>Penyelenggara SPBE</i>	1,00
Domain Manajemen SPBE	1,27
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	1,38
<i>Audit TIK</i>	1,00
Domain Layanan SPBE	2,92
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,30
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	2,33

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE untuk Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah terpenuhi untuk indikator Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Tingkat kematangan kebijakan internal layanan Pusat Data, tingkat kematangan kebijakan internal layanan jaringan intra, tingkat kematangan kebijakan internal manajemen keamanan informasi, tingkat kematangan kebijakan internal tim koordinasi SPBE

- Kekuatan

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE Pemkab Bolaang Mongondow Utara, belum ada indikator yang menjadi kekuatan. Beberapa indikator seperti Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data, Tingkat kematangan kebijakan internal layanan Pusat Data, tingkat kematangan kebijakan internal layanan jaringan intra masih memenuhi level 3 dan belum menjadi indikator yang menjadi kekuatan aspek. Walaupun telah memiliki kebijakan internal tata Kelola yaitu PERDA NOMOR 5 TAHUN 2023 namun pembahasan peraturan kebijakan masih belum mencakup keseluruhan referensi dan belum ada proses reviu dan tindak lanjut.

- Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Adapun indikator yang masih tergolong lemah adalah tingkat kematangan kebijakan internal penggunaan sistem penghubung, Tingkat kematangan kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, tingkat kematangan kebijakan internal manajemen keamanan informasi dan tingkat kematangan kebijakan internal tim koordinasi SPBE. Walapun pemerintah kabupaten telah memiliki Peraturan Daerah terkait SPBE dengan nomor 5 TAHUN 2023, namun peraturan masih belum mencakup keseluruhan referensi yang diminta. Pada peraturan daerah nomor 5 Tahun 2023 ini juga tidak secara lengkap mengatur terkait SPBE sehingga pada beberapa indikator seperti indikator tingkat kematangan kebijakan internal penggunaan sistem penghubung dan indikator tingkat kematangan kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah memberikan bukti dukung dari peraturan terdahulu yaitu Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 25 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK, namun pada perbup ini jugat tidak didapatkan referensi terkait kedua indikator ini. Pada indikator tingkat kematangan kebijakan internal tim koordinasi SPBE, pemkab sudah memiliki kebijakan yaitu Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 181 Tahun 2021 tentang Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, walapun sudah mencakup pengaturan tugas namun data dukung tidak menunjukkan telah diterapkan untuk keseluruhan unit kerja.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perancangan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE

- Kekuatan

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum memiliki kekuatan pada indikator terkait aspek perencanaan strategis SPBE.

- Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum memiliki perencanaan strategis terkait indikator Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE, pemkab melampirkan data dukung berupa beberapa SOP dan surat keputusan Bupati, namun dokumen yang dilampirkan bukan merupakan dokumen proses bisnis SPBE sehingga disimpulkan data dukung tidak relevan. Untuk indikator Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE dan Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE, data dukung yang dilampirkan adalah Rencana Induk TIK tahun 2018 - 2023. Walaupun beberapa referensi sudah ada namun belum mencakup keseluruhan referensi, seperti contoh pada Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE sebagian

telah tertuang pada Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RTIK) yaitu pada Bagian 4 Halaman 171 s/d 210 yang menguraikan tentang Tata Kelola TIK, SDM, layanan dan infra struktur, namun belum mencakup keamanan SPBE dan Audit SPBE. Sedangkan untuk indikator Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE, data dukung yang dilampirkan adalah DPA tahun anggaran 2022 terkait perencanaan belanja anggaran pemerintah daerah. Walaupun telah terdapat anggaran untuk dinas Kominfo, namun data dukung tidak menunjukkan telah ada proses konsultasi terkait DPA dengan unit pengelola TIK sehingga Rencana dan Anggaran SPBE pada unit kerja/perangkat daerah tidak seluruhnya dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu hanya indikator Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang mendapatkan nilai 3.

- Kekuatan
Belum ada indikator yang menjadi kekuatan untuk aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Kelemahan
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih belum memiliki dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa telah diterapkannya Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk indikator Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE, Kematangan Layanan Pusat Data, Kematangan penggunaan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah dimana bukti dukung atau pengaturan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE yang disampaikan belum relevan dan tidak lengkap. Sebagai contoh untuk indikator kematangan pembangunan aplikasi dimana dokumen yang dilampirkan berupa surat permintaan pembangunan aplikasi dan bukan dokumen yang menunjukkan siklus pembangunan aplikasi di pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Untuk indikator kematangan pusat data, data dukung yang dilampirkan berupa beberapa dokumen SOP, namun tidak ada dokumen yang mengacu pada SOP untuk pusat data. Sedangkan untuk indikator tingkat kematangan sistem penghubung, tidak ada data dukung yang dilampirkan.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan belum ada aspek Penyelenggaraan SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

- Kekuatan
Tidak ada indikator yang menjadi kematangan pemenuhan aspek penyelenggara SPBE pada pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- Kelemahan
Kelemahan : Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih belum menyelenggarakan SPBE dimana tidak ada data dukung yang dilampirkan. Untuk semua indikator pada aspek penyelenggara SPBE yaitu indikator kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dan indikator kematangan Kolaborasi penerapan SPBE

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan pada aspek Penerapan Manajemen SPBE pemenuhan aspek untuk indikator Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE

- Kekuatan
Belum ada indikator yang menjadi kekuatan untuk aspek penerapan manajemen SPBE pada pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- Kelemahan
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih belum melaksanakan penerapan manajemen SPBE seperti Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Manajemen Perubahan, Penerapan Manajemen Layanan SPBE dimana beberapa indikator tidak ada data dukung yang dilampirkan dan tidak tertuang dalam peta rencana. Beberapa indikator mencapai level 2 yaitu indikator Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan indikator Penerapan Manajemen Layanan SPBE. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dimana IPPD melampirkan data dukung berupa dokumen Rencana Kerja yaitu RENCANA PROGRAM

F. Audit TIK

Secara keseluruhan belum ada aspek Pelaksanaan Audit TIK yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

- Kekuatan
Belum ada indikator yang menjadi kekuatan untuk aspek pelaksanaan audit TIK pada pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- Kelemahan
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih belum melaksanakan pelaksanaan Audit TIK seperti Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan dalam pelaksanaan audit TIK yang disampaikan

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Layanan Kinerja Pegawai.

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat indikator yang menjadi kekuatan yaitu Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Layanan Kinerja Pegawai. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menggunakan sebagian aplikasi berbagi pakai seperti Layanan administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu SIPD yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah mampu memberikan layanan kolaborasi dengan layanan SPBE lainnya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa tangkapan layar
- Kelemahan
Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih belum memiliki Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah dan Layanan Kearsipan Dinamis dimana data dukung yang dilampirkan tidak relevan.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah terpenuhi untuk beberapa indikator pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu Layanan Data Terbuka, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 3

- Kekuatan
Adapun indikator yang menjadi kekuatan untuk aspek layanan publik berbasis elektronik adalah Layanan Publik Sektor 1, dimana pemerintah daerah telah mengimplementasikan aplikasi SICANTIK untuk pengurusan perizinan dimana aplikasi ini merupakan aplikasi berbagi pakai milik pusat yang sudah memenuhi kriteria level kolaborasi.
- Kelemahan
Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih belum memiliki Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, tingkat kematangan Layanan Publik Sektor 2 dan tingkat kematangan layanan JDIH. Untuk indikator Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memberikan data dukung berupa draft SK Tim SP4N LAPOR, dimana SK masih berupa draft. Berdasarkan data dukung menunjukkan bahwa aplikasi SP4AN LAPOR belum diterapkan di IPPD. Untuk indikator Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dimana Data dukung berupa scene shot aplikasi e-fin. Namun Aplikasi e-fin bukan ditujukan untuk public namun lebih spesifik untuk lingkungan pegawai non-asn di IPPD, sehingga tidak dapat memenuhi kriteria sebagai layanan Publik. Untuk indikator Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memberikan bukti dukung berupa penerapan aplikasi JDIH, aplikasi JDIH merupakan aplikasi public berbagi pakai dengan kemampuan melayani unggah, file produk hukum, unduh data produk hukum, pencarian produk hukum. Namun JDIH belum memiliki fitur transaksi dan terintegrasi dengan aplikasi SPBE lainnya

REKOMENDASI

Ringkasan

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, menggambarkan predikat cukup dalam penerapan SPBE, Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan

Belum ada keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, namun terdapat satu aspek yaitu aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang memiliki nilai mendekati unggul. Pada aspek layanan publik berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menggunakan aplikasi umum berbagi pakai seperti Layanan Data Terbuka, Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 3 yang telah mencapai level 4.

Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih memiliki beberapa kelemahan, khususnya pada aspek Audit TIK, Penerapan Manajemen SPBE, Penyelenggara SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Perencanaan Strategis. Aspek-aspek ini bernilai rendah karena terdapat data dukung tidak dilampirkan dan beberapa data dukung yang dilampirkan tidak relevan dan tidak lengkap.

Pada aspek audit TIK dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan dalam pelaksanaan audit TIK yang disampaikan. Pada aspek penerapan manajemen data tidak ada data dukung yang dilampirkan. Selain itu semua kegiatan pada aspek penerapan manajemen SPBE dan aspek audit TIK setiap indikator tidak dituangkan dalam peta rencana.

Apresiasi/SaranPerbaikan

Pada Aspek Kebijakan Tata Kelola yang masih belum optimal direncanakan dapat disusun dalam bentuk master plan atau perencanaan TIK. Untuk aspek perencanaan strategies dibangun kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi berdasarkan dari kebijakan yang telah disusun di Master Plan. Begitu juga untuk aspek lainnya seperti Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Aspek Penyelenggaraan SPBE dan Aspek Pelaksanaan Audit TIK. Untuk meningkatkan kematangan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan dapat dengan cara menggunakan aplikasi SPBE pusat berbagi pakai yang telah ditetapkan secara nasional atau melakukan replikasi dari layanan-layanan publik sejenis yang dibangun oleh Instansi lainnya. Pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya diharapkan sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria yang lebih baik.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	1
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	2
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	1
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	4
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	1
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	1
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	1
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3